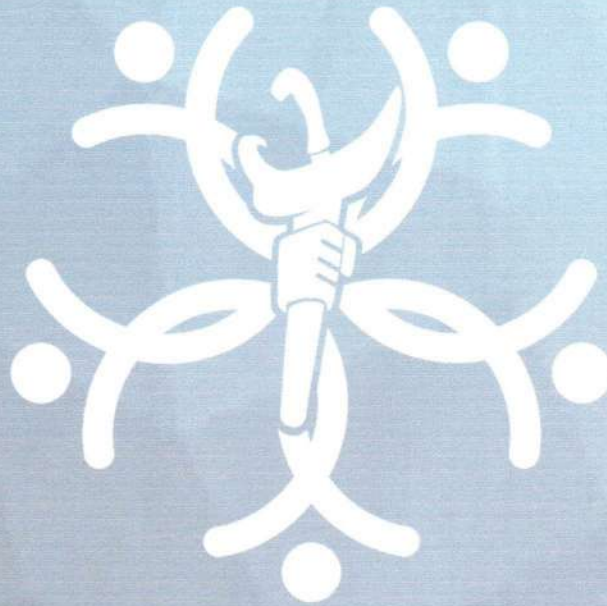




UPTD PENKOM KEPRI

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Kepegawaian Daerah
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER

TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT ORGANISASI	: UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROGRAM	: PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (5.03.02)
KEGIATAN	: PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN (5.03.02.1.03)
SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER (5.03.02.1.03.0002)
SASARAN PROGRAM	: TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

A. PENDAHULUAN

Kompetensi ASN adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sesuai standar yang ditetapkan untuk pelaksanaan yang profesional, efektif dan efisien. Terdapat 3 (tiga) jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN yaitu : Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu dibangun sistem penjaminan kemampuan Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi tersebut dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi, apabila kompetensi yang dimiliki oleh ASN tidak dikembangkan. Dimana penilaian dan pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN adalah hal yang mutlak, ketika seseorang memiliki kompetensi yang bagus maka akan berdampak pada tim dan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut juga berlaku tidak hanya pada *private sector*, namun juga pada *public sector*.

Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui metode *classical* atau *nonclassical*, dan menggunakan biaya maupun tidak menggunakan biaya. Contohnya diskusi daring yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu dari pengembangan kompetensi. "Pengembangan kompetensi tidak dibatasi hanya pada biaya, dalam kondisi saat ini pun tidak menghalangi kita untuk produktif".

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 370);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 926);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

C. SASARAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan Penilaian Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan sasaran ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Administrator	: 214 orang
2. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	: 200 orang
3. Jabatan Fungsional Ahli Muda	: 200 orang
4. Jabatan Pelaksana	: <u>150 orang +</u>
Total	: 764 orang

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

➤ Maksud Kegiatan :

Untuk memastikan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu dibangun sistem penjaminan kemampuan Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.

➤ Tujuan Kegiatan :

1. Memberikan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima layanan;
2. Memastikan Kompetensi Pegawai ASN dalam menyelenggarakan manajemen ASN;
3. Mewujudkan sistem pelayanan berbasis Kompetensi pada pengelolaan manajemen ASN;
4. Memberikan gambaran kebutuhan pengembangan Kompetensi;
5. Mewujudkan efisiensi pelaksanaan tugas Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah menuju efisiensi nasional;
6. Memastikan produktivitas dan kinerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C1 Lantai 2 – Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang.

F. ANGGARAN DAN RINCIAN BELANJA

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center tahun 2025 sebesar Rp. 718.190.000,- (*Tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Secara terperinci anggaran dapat disajikan pada table berikut:

REKENING	BELANJA	PAGU (Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.204.700,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.156.396,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.345.150,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520.000,-
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	301.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.631.700,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.910.500,-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.542.554,-
5.1.02.02.10.0001	Belanja Modal Personal Computer	312.023.800,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.388.000,-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)	618.190.000,-
Total Anggaran		718.190.000,-

G. JADWAL PELAKSANAAN

Tabel Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perasiapan												
2.	Penyusunan Instrumen/ Simulasi												
3.	Pengambilan Data ASN												
4.	Pelaksanaan Penilaian Kompetensi												
5.	Penyusunan Hasil Penilaian Kompetensi												
6.	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kompetensi												
7.	Penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center												

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
Pengguna Anggaran (PA)**



YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601232003122008

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal Januari 2025

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



HELVIS FERDINANSYAH B., S.E.
Penata (III/c)
NIP 19840915 2014041001



Lampiran KAK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.27.0000 Badan Kepegawaian dan KORPRI
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Provinsi Kepulauan Riau
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 718.190.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 650.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	6,53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 718.190.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pejabat Fungsional yang dibina karirnya	175 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 718.190.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.069.446,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.069.446,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.204.700,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.204.700,00
	[-] Ballpoint Gel Ink Uni-Ball Broad UM-153					Rp. 766.800,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Gel Ink Uni-Ball Broad UM-153 (TANJUNGPINANG)	3	Kotak	255.600,00	0 %	Rp. 766.800,00
	[-] Besar Cutter					Rp. 87.000,00
	Cutter Spesifikasi : Besar Cutter (TANJUNGPINANG)	3	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 87.000,00
	[-] Binder Clip 105					Rp. 93.000,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 105 (TANJUNGPINANG)	10	Kotak	9.300,00	0 %	Rp. 93.000,00
	[-] Binder Clip 155					Rp. 67.500,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip 155 (TANJUNGPINANG)	5	Kotak	13.500,00	0 %	Rp. 67.500,00
	[-] Pensil Grade HB For Computer					Rp. 190.400,00
	Pensil Spesifikasi : Pensil Grade HB For Computer (TANJUNGPINANG)	4	Kotak	47.600,00	0 %	Rp. 190.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.156.396,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.156.396,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 3.156.396,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 80 Gr (TANJUNGPINANG)	20	Rim	69.300,00	11 %	Rp. 1.538.460,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 80 Gr (TANJUNGPINANG)	16	Rim	91.100,00	11 %	Rp. 1.617.936,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.345.150,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.764.400,00
	[-] Cetak Buku Panduan					Rp. 962.400,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (TANJUNGPINANG)	6	Eksemplar	160.400,00	0 %	Rp. 962.400,00
	[-] Cetak Laporan Akhir					Rp. 802.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (TANJUNGPINANG)	5	Eksemplar	160.400,00	0 %	Rp. 802.000,00
	[#] Cetak MAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.580.750,00
	[-] Cetak MAP Dinas					Rp. 2.580.750,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Map Dinas, Fullcolor 1 sisi, art carton 260gsm, 35...	150	Buah	15.500,00	11 %	Rp. 2.580.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 520.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 520.000,00
	[-] Materai 10.000					Rp. 520.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai Rp.10.000 (kantor pos) (TANJUNGPINANG)	50	Buah	10,400,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp. 301.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 301.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 301.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran Sama F4/A4	602	Lembar	500,00	0 %	Rp. 301.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.631.700,00
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.631.700,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 1.631.700,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer 664 (TANJUNGPINANG)	10	Botol	147.000,00	11 %	Rp. 1.631.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.910.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.910.500,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp. 33.910.500,00
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	200	Kotak	41.000,00	11 %	Rp. 9.102.000,00
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa (Kepulauan Riau)	894	Kotak	25.000,00	11 %	Rp. 24.808.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.542.554,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.542.554,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 42.542.554,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.542.554,00
	[-] Asesor SDM Aparatur					Rp. 40.040.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Asesor SDM Aparatur	40	Orang / Jam	1.001.000,00	0 %	Rp. 40.040.000,00
	[-] Tim Administrasi Luar Pemerintah Daerah					Rp. 2.502.554,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Tim Administrasi Luar Pemerintah Daerah	1 x 1.00002158	Orang / Kegiatan Kegiatan	2.502.500,00	0 %	Rp. 2.502.554,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.388.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.388.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.388.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.388.000,00
	[-] JAKARTA					Rp. 12.388.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi : Tanjungpinang - Jakarta (PP)	2	Orang / PP	2.888.000,00	0 %	Rp. 5.776.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I) Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 618.190.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 618.190.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 618.190.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 618.190.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 618.190.000,00
	[#] Belanja Personal Computer (PC) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 618.190.000,00
	[-] Laptop					Rp. 618.190.000,00
	Laptop Spesifikasi : i3 Ram 8GB SSD 256GB (TANJUNGPINANG)	50 x 0.859506999	Unit	12.810.200,00	11 %	Rp. 618.190.000,00
Jumlah :						Rp. 718.190.000,00
			Provinsi Kepulauan Riau,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Korpri YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos., M.M. NIP. 197601232003122008			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	196510091993101002	KETUA	
2	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE, MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3	LUKI ZAIMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	196602161986021003	WAKIL KETUA III	
5	MISNI, SKM, M.Si	197305161999032007	WAKIL KETUA IV	
6	VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng.	196805281998032004	WAKIL KETUA V	
7	DIKY WIJAYA, S. E., M. Si	197308212003121002	WAKIL KETUA VI	
8	Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.	197410222002122003	SEKRETARIS	